

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Bambang Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Didiek M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djoko Prakoso. 1988. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, Dan Eksaminasi Perkara Didalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- H. Dhoni Martien. 2023. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makassar: Mitra Ilmu.
- H. John Kenedi. 2020. *Perlindungan Saksi Dan Korban*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Henny Nuraeny. 2004. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta : sinar grafika.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jimly Ashididqie. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press.
- Johhny Ibraahim. 2012. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1982. *Ganti rugi dan Rehabilitasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhadar. Edi Abdullah. Husni Thamrin. 2009. *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muladi. 2005. *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Namira Wulandari Nawawi. Nur Azisa. Syarif Saddam Rivanie Parawansa. 2023. *Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana*. Yogyakarta: Karya Bakti Makmur Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 2021. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Maha Karya Pustaka.
- Supriyadi Widodo Eddyono, et.al. *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317).

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Perlindungan Saksi dan Korban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102).

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan/atau Korban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1341).

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 69)

Pedoman Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana

## **Skripsi**

Andi Alvian Arifirman. 2022. Skripsi. *Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

## **Jurnal**

Anak Agung Gede Wiweka Narendra. I Gusti Bagus Suryawan. I Made Minggu Widyantara. 2020. *Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*. Ontslag Van Rechtsvervolging), Jurnal Konstruksi Hukum 1, no. 2 October 28.

Agusta, Hendrawan. 2020. *Pertanggungjawaban KHPM Dalam Proses IPO Jika Terdapat Fakta Material Yang Terungkap*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Christian Goklas, Beniharmoni Harefa, 2021, Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Membantu Pemberian Restitusi Pada Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ghoniya Zulindah Maulidya. Syahdila Nur Rahmawati. Vina Rahmawati, Alifian Fahdzan Mardany. 2023. *Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Surabaya: Jurnal Hukum Vol. 3, No. 1.

Greufid Katimpali. 2020. *Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dibebankan Kepada Pelaku Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Lex Crimen Vol. IV No.8.

Khairul Riza. 2023. *Hak Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang: Sebuah Langkah Penting Menuju Keadilan Di Indonesia*, Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan, Universitas Batam.

Nedra Wati. 2021. *Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat*, Padang: Universitas Ekasakti. Volume 5, Issue 2.

Riky Sembiring. 2018. *Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles*, Aktual Justice, Vol. 3 No. 2.

Shafira Saodana. Syamsuddin Muchtar. Nur Azisa. 2023. *Efektivitas Hukum Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar*, Alauddin Law Development Journal (ALDEV). Makassar: Fakultas Hukum UIN Alauddin. Vol. 5, No. 2.

Syarif Saddam Rivanie, *et.al.*, 2022. Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana, Halu Oleo Law Review, Vol. 6 Issue 2.

## Sumber Internet

Menpan.go.id, *Satgas TPPO Tetapkan 901 Tersangka Kasus Perdagangan Orang*, 15 Agustus 2023, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tpo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang>, diakses pada tanggal 20 September 2024.

## **Wawancara**

Wawancara dengan Stevie Mauri, salah satu pegawai Kejaksaan Negeri Fakfak, melalui pesan *Whatapp*, 07 Maret 2025.

Wawancara dengan Sri Juniardhani T., S.Psi., JF Penata Perlindungan Saksi dan Korban Ahli Pertama, melalui *zoom meeting*, pada tanggal 14 Maret 2025.